

## **I. JUDUL PENELITIAN**

### **PANDANGAN HATTA TENTANG HAM DAN DEMOKRASI PANCASILA**

## **II. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam konsepsi sejarah, berakhirnya Perang Dunia II seringkali dilihat sebagai kemenangan panji demokrasi, dan keruntuhan bendera fasisme. Pada saat kekuatan komunisme di Eropa Timur dan pemerintahan otoritarian di Amerika Latin mengalami keruntuhan, kekuatan demokrasi kembali menduduki posisi sentral dalam agenda persoalan kenegaraan dan kebangsaan di berbagai negara di dunia. Persoalannya sangat jelas, yakni menempatkan demokrasi dan Hak Azasi Manusia atau disingkat HAM sama dengan meletakkan kedaulatan rakyat di garis terdepan dari seluruh pengelolaan sosial-politik dan ekonomi suatu negara. Bahkan dalam ketatanegaraan Indonesia, demokrasi dan HAM merupakan suatu konsep yang paling sering diperdebatkan, terutama dalam rangka mencari format demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang plural.

Jika ada pemimpin Indonesia yang hampir sempurna dalam karakter dan integritas pribadi, maka Mohammad Hatta atau akrab dipanggil Hatta adalah salah satu yang menonjol. Wawasan intelektualnya sangat jauh ke depan, sementara moral politiknya yang prima dan anggun banyak diakui kawan dan lawan. Dalam suasana sengketa politik dengan Bung Karno, komunikasi persaudaraan antara keduanya tidak pernah putus, walaupun watak keras Hatta dalam politik tersebut sempat mengecewakan generasi muda karena kegagalannya dalam membujuk Hatta agar jangan meninggalkan kursi wakil presiden (Syafii Maarif, 1996: 3).

Jaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945) bagi Mohammad Hatta, merupakan sebuah ujian besar, yang hanya dapat diatasinya karena optimisme akan tercapainya cita-cita Indonesia merdeka. Dalam pada itu beliau mempunyai keyakinan bahwa Perang Pasifik akan membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Hatta tidak percaya bahwa Jepang akan menang dengan Amerika/Sekutu yang mempunyai *productie-potential* begitu hebat. Tetapi berhubung dengan keuntungan permulaan yang diperoleh Jepang, perang tidak akan bisa selesai dalam tiga tahun. Masa perang itu bagi Hatta harus dipergunakan untuk mempersiapkan tenaga perjuangan rakyat, yang nantinya sanggup

memikul kemerdekaan apabila Jepang sudah kalah (Hatta, 1972: 121). Kalau tidak bisa dielakkan maka kerjasama dengan pemerintah militer Jepang itu, menurut pertimbangan Hatta, bisa berarti untuk meringankan banyak sedikitnya penderitaan yang ditimpakan pemerintah militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Selama pendudukan Jepang, Hatta jarang berbicara di depan umum, walaupun berbicara lebih sering sekedar memberikan obat pelipur lara dalam jiwa rakyat yang sedang tertekan.

Ketika Jepang menyerah pada bulan Agustus 1945, maka meletuslah amarah orang-orang Indonesia terhadap Jepang, dan timbulah dorongan aktif untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Pandangan Hatta yang jauh ke depan mengatakan pendiriannya bahwa Jepang yang kalah tidak menjadi soal lagi. Soal yang paling penting adalah menghadapi tentara Sekutu yang akan mengembalikan kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia. Oleh sebab itulah Hatta menyusun siasat antara perang dan damai untuk mencapai pengakuan Indonesia merdeka. Kemudian Hatta memilih damai. Akan tetapi seperti seringkali diucapkannya “kita cinta perdamaian, akan tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan” (Hatta, 1972: 122).

Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sukarno dan Hatta, di Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Semenjak itu Hatta berperan aktif memimpin negara RI sebagai wakil presiden, dan dalam keadaan yang sangat sulit Hatta harus merangkap sebagai Perdana Menteri tahun 1948-1949. Politik yang diperjuangkannya akhirnya mencapai tujuan dengan diakuinya Indonesia sebagai negara berdaulat yang terdiri atas bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda pada Konferensi Meja Bundar tahun 1950.

Pada waktu Republik Indonesia Serikat berdiri, Hatta yang menjadi Perdana Menteri pertama dan terakhir. Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk sesuai amanat proklamasi, Hatta terpilih sebagai wakil presiden oleh parlemen (Joeniarso, 2001: 19). Dalam kiprah politiknya itulah Hatta memberikan gagasan-gagasan penting tentang ketatanegaraan Indonesia termasuk pemikirannya tentang HAM dan Demokrasi Pancasila sebagaimana yang akan dikaji dalam penelitian ini.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengajukan perumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan Hatta tentang Hak Azasi Manusia ?
2. Bagaimana pandangan Hatta tentang Demokrasi Pancasila ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menemukan secara utuh pandangan Hatta tentang Hak Azasi Manusia.
2. Untuk menemukan secara utuh pandangan Hatta tentang Demokrasi Pancasila.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Memberi sumbangan yang berarti bagi pengayaan kajian mata kuliah Sejarah Indonesia dan Filsafat Sejarah.
2. Memberi kontribusi bagi civitas akademika untuk belajar dari tokoh nasional melalui pemikiran-pemikirannya, sehingga dapat dilakukan penilaian terhadapnya.

## **III. KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Demokrasi Pancasila**

Kebudayaan merupakan ruh dan jati diri bangsa dalam kehidupan bernegara, di mana tinggi rendahnya martabat bangsa sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya budaya bangsa itu sendiri. Jati diri bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh hasil proses aktualisasi nilai-nilai budaya bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kedaulatan Rakyat, 28 Juli 2004). Pancasila sebagai budaya dan ideologi yang sedang men “sistem”, harapannya adalah akan mampu menopang tuntutan demokrasi yang bertahap maju secara kultural-edukatif, dengan rujukan pola pikir budayawinya sendiri. Sistem ideologi yang mampu tumbuh dengan terbuka mengemban peningkatan kesadaran dan partisipasi politik dan ekonomi rakyat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu, tanpa efek alienasi budaya, bahkan memperkuat wujud kebangkitan nasional Indonesia yang tahapannya semakin matang dan dewasa. Ini mengimplikasikan kebutuhan akan politik kebudayaan yang di dasarkan pada Pancasila. Dengan lain kata, untuk menciptakan budaya bangsa yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila diperlukan suatu rekayasa kebudayaan atau suatu strategi kebudayaan (Sastraprteja, 1992: 141). Perlu disadari batas-batasnya serta kehati-hatian dalam menentukan caranya, sehingga strategi budaya itu sendiri tidak justru menghasilkan sesuatu yang kontra-produktif atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip budaya demokrasi Pancasila yang hendak diterapkan.

Dengan demikian dapat dihindarkan segala kecenderungan yang menjadikan Pancasila Ideologi totaliter.

Pendefinisian ideologi disini tidak terlalu membedakan antara ideologi dan paham serta tidak membedakan ideologi yang bersifat murni atau tidak. Sebab menurut koran Pedoman yang terbit di tahun 1960 dengan mengutip pemikiran ahli politik Barat, ideologi yang benar-benar murni di dunia itu ada tiga yaitu liberalisme, sosialisme dan islam. Pancasila merupakan contoh ideologi campuran, karena merupakan perpaduan dari berbagai unsur ideologi murni yaitu liberalisme dan sosialisme ditambah dengan nilai-nilai moral dan budaya Indonesia. Hal ini terbukti dengan kenyataan yang sama di dunia sekarang ini dimana berkembang ideologi jalan ketiga (*Third Way*) yang merupakan kompromi atau campuran antara liberalisme dan sosialisme.

Alfian (1992: 190), mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan demokrasi antara lain terletak pada kualitas yang terkandung di dalam dirinya. Di samping itu relevansinya terletak pada posisi komparatif terhadap ideologi-ideologi lain sehingga bangsa Indonesia yang meyakini, menghayati dan memahami mengapa Pancasila adalah ideologi untuk dipakai sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam membangun dirinya dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan politik.

Menurut Hatta (1977: 17), Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin sila-sila yang lain. Seperti halnya sila kerakyatan atau demokrasi, Hatta yakin bahwa demokrasi akan hidup selama-lamanya di bumi Indonesia, sekalipun akan mengalami pasang naik dan pasang surut. Menurut Hatta, sumber demokrasi atau lebih tegasnya demokrasi sosial, di Indonesia ada tiga. *Pertama*, sosialisme Barat yang membela prinsip-prinsip humanisme, dan prinsip ini juga dipandang sebagai tujuan. *Kedua*, ajaran Islam yang memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam bermasyarakat. *Ketiga*, pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat di desa-desa di Indonesia. Ketiga sumber inilah yang akan menjamin kelestarian demokrasi di Indonesia, sehingga Hatta berkeyakinan bahwa demokrasi di Indonesia mempunyai dasar yang kukuh.

## **B. Hak Azasi Manusia**

Terdapat tiga negara yang dianggap sebagai peletak dasar hak asasi manusia (HAM) yaitu Inggris, Amerika Serikat dan Perancis. Hal ini disebabkan dunia Islam sejak berdirinya negara (*daulah*) di Madinah sampai zaman runtuhnya Daulah Khilafah Turki Utsmani, sudah sejak lama memiliki hak tersendiri untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang disebut sebagai Hak Syar'i Manusia (HSM). Dalam dataran teori dan prakteknya, antara HAM dan HSM memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya saja, hal ini memang jarang sekali dibahas bahkan kaum muslimin sendiri, karena memang pemahaman yang mengalami kemunduran dan pemikiran kaum muslimin sekarang lebih mengacu pada teori *mainstream* Barat, termasuk pemikiran Hatta tentang HAM yang akan dijadikan studi dalam penelitian ini, semakin membuktikan pengaruh pemikiran Barat yang lebih dominan terhadap kebanyakan tokoh-tokoh Indonesia yang terkenal.

Sebagai sedikit pengetahuan, HSM yang bersumber dari syari'at Islam berusaha menjamin 8 hal: (1) menjaga agama; (2) menjaga jiwa; (3) menjaga akal; (4) menjaga keturunan; (5) menjaga harta; (6) menjaga kehormatan; (7) memelihara keamanan; (8) memelihara negara. Tentu saja HSM pun memiliki esensi yang berbeda dengan *Islamic Universal Declaration of Human Rights* (IUDHR) yang ada dan sedang *digodog* saat ini yang mengatakan bahwa hak-hak dalam Islam sama dengan Barat. Memang, kaum muslimin sekarang ini lebih sering bersikap defensif apologetik, untuk menyesuaikan apa-apa dengan standar Barat yang belum tentu baik dan benar. Sedangkan, hak-hak yang tercakup dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dapat disimak dari kutipan berikut:

***The rights described in the 30 articles of the Universal Declaration of Human Rights include the right to life, liberty, and security of person; to freedom of conscience, religion, opinion, expression, association, and assembly; to freedom from arbitrary arrest; to a fair and impartial trial; to freedom from interference in privacy, home, or correspondence; to a nationality; to a secure society and an adequate standard of living; to education; and to rest and leisure. The declaration also affirms the rights of every person to own property; to be presumed innocent until proven guilty; to travel from a home country at will and return at will; to work under favorable conditions, receive equal pay for equal work, and join labor unions at will; to marry and raise a family; and to participate in government and in the social life of the community.***

Inggris merupakan negara pertama yang secara giat memperjuangkan hak asasi manusia, seperti pada masa pemerintahan Raja John Lackland (1199-1216), yang memerintah secara sewenang-wenang. Para bangsawan tidak tahan dengan kesewenangan

raja, kemudian mengadakan protes keras yang akhirnya melahirkan piagam “Magna Charta” tahun 1215. Dalam piagam tersebut untuk pertama kalinya muncul pengertian HAM walaupun dalam bentuk yang belum sempurna, bahkan dapat diartikan hanya merupakan hak dari kaum bangsawan.

Sedangkan di Amerika Serikat, yang saat itu sebagai jajahan Inggris mendapat pengaruh gerakan HAM di negara induk. Rakyat Amerika yang ingin mendapat kemerdekaan menyatakan deklarasi yang dikenal “Declaration of Independence” tanggal 4 Juli 1776. Deklarasi tidak sekedar mengumumkan kelahiran negara baru, tetapi juga mencetuskan falsafah kemerdekaan manusia. Ia tidak bersandarkan kepada keluhan-keluhan khusus, melainkan bersandar pada landasan kebebasan perseorangan. Hal ini dilanjutkan dengan munculnya konsep HAM tanggal 27 Agustus 1789.

Dalam skala lebih besar, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional, tiga tahun setelah berdiri (1948) membentuk komisi HAM dimana soal-soal hak sosial dan ekonomi diberi tempat di samping hak politik. Setelah bersidang dengan pembahasan matang tanggal 10 Desember 1948 menerima secara bulat hasil pekerjaan komisi berupa pernyataan sedunia tentang HAM atau sering disebut dengan *Declaration of Human Rights* (Wreksosuhardjo, 2001: 18).

UUD 1945 di Indonesia, seperti UUD lain di dunia juga mencantumkan masalah HAM. Walaupun UUD 1945 disusun sebelum adanya *Declaration of Human Right*, ternyata telah banyak mencantumkan HAM dalam beberapa pasal (Joeniarto, 2001: 19). Bung Hatta sebagai salah satu sosok yang gigih memperjuangkan HAM dalam penyusunan UUD 1945. Masalah HAM memang menjadi perdebatan dalam sidang-sidang pembahasan UUD. Soepomo yang menawarkan bentuk negara integralistik menganggap bahwa HAM tersebut dianggap berlebihan, dibayangkan berdampak negatif dan sebagai hak-hak perorangan yang selalu di bawah kepentingan bersama (Soekarno, 1966: 78). Pendapat Soepomo didukung oleh Soekarno yang menganggap bahwa individualistik inilah yang akan menimbulkan konflik di negara kita bila masalah tersebut dimasukkan dalam UUD (Swasono, 1992: 261). Meskipun Hatta banyak mendapat kritikan kawan-kawan politiknya, tetapi Hatta tetap konsisten dan tegar membela prinsip-prinsip HAM yang berdasarkan termonologinya dianggap sangat penting bagi pembangunan bangsa seutuhnya.

Hatta yang setelah sekian lama berkecimpung dalam pergerakan kemerdekaan dan mengasah otaknya dengan menulis di berbagai media masa, menganggap bahwa sangatlah penting untuk memasukkan hak-hak individu tersebut. Usul Bung Hatta mendapat dukungan dari Mohammad Yamin. Akhirnya karena usaha gigih Bung Hatta itulah kita memiliki pasal 28 UUD 1945 yang sebelum amandemen hanya berbunyi berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal tersebut sekarang telah dirinci secara jelas menjadi 10 sub pasal yang terdiri 26 ayat. Sedangkan Pasal 29 yang juga tentang HAM tidak mengalami perubahan. Tanpa pasal 28 dan 29 UUD 1945, yang didasarkan pada paham integralistik hanya akan menjadikan negara Indonesia sebagai negara kekuasaan yang akan memberikan kepada para pemimpin, kekuasaan dengan asumsi para pemimpin adalah negarawan tanpa pamrih pribadi, suatu slogan yang lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan.

#### **IV. METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Bidang Penelitian**

Bidang masalah yang akan dikaji adalah masalah **Filsafat Sejarah** yang berkaitan dengan pemikiran Hatta tentang HAM dan Demokrasi Pancasila.

##### **B. Bentuk/Strategi Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yang lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna/persepsi, maka jenis penelitian dengan strateginya yang cocok dan relevan adalah **penelitian kualitatif deskriptif**. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis yang teliti dan penuh makna. Sedangkan strategi penelitiannya adalah menggunakan **pendekatan hermeneutik** dengan jenis **analisis isi** atau **content analysis**.

Analisis isi merupakan suatu teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan. Penganalisis dalam hal ini tidak hanya tertarik pada pesan itu sendiri, melainkan pada pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas tentang proses dan dampak komunikasi, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tujuan utama dari analisis isi adalah membuat inferensi. Strategi ini akan digunakan

dalam menganalisis pesan dan informasi mengenai pemikiran Hatta tentang HAM dan Demokrasi Pancasila.

Dalam psikologi, analisis isi menemukan tiga ranah aplikasi penting. Pertama adalah, analisis terhadap rekaman verbal guna menemukan hal-hal yang bersifat motivasional, psikologis atau karakteristik-karakteristik kepribadian. Aplikasi ini telah menjadi tradisi tentang pemanfaatan dokumen-dokumen pribadi, dan aplikasi analisis terhadap struktur kognitif. Aplikasi kedua adalah pemanfaatan data kualitatif yang dikumpulkan dalam bentuk jawaban atas pertanyaan terbuka (Krippendoff, 1991:11). Di sini analisis isi memperoleh status teknis pelengkap yang memungkinkan peneliti memanfaatkan data yang hanya dapat dikumpulkan dengan cara yang tidak terlalu membatasi pokok bahasan dan menguji silang kesahihan temuan yang diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik yang berbeda. Aspek ketiga menyangkut proses-proses komunikasi dimana isi merupakan bagian intergralnya (Krippendoff, 1991:11).

### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berhadapan dengan data yang bersifat khas, unik, *idiocyncratic*, dan multiinterpretable. Data yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif tidak bersifat nomotetik (satu data satu makna) seperti dalam pendekatan kuantitatif atau positivisme. Untuk itu, data-data kualitatif perlu ditafsirkan agar mendekati kebenaran yang diharapkan (Waluyo, 2000: 20). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen baik verbal maupun non verbal baik media cetak maupun media elektronik.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah **teknik dokumentasi**. Teknik pengumpulan data jenis ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang cenderung mencatat apa yang tersirat dan yang tersurat. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen baik berupa buku referensi, artikel, jurnal, majalah, ensiklopedi, surat resmi, keputusan



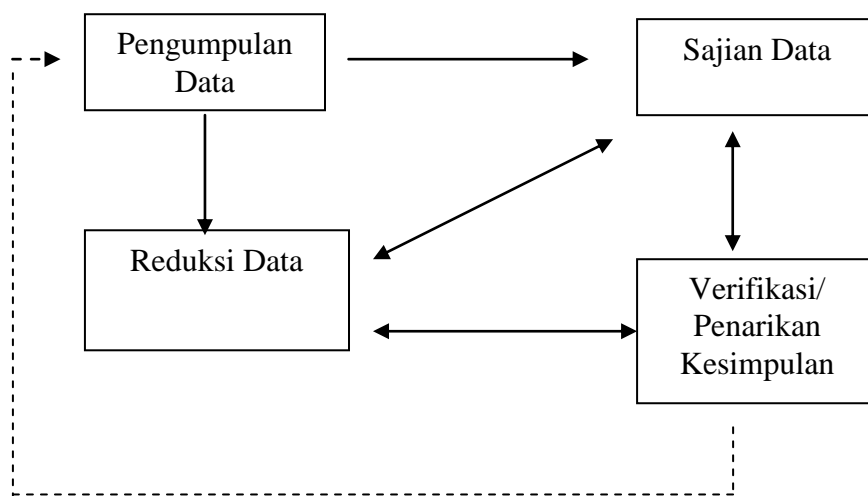
resmi, sumber verbal dari media elektronik, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemikiran Hatta tentang HAM dan Demokrasi Pancasila.

### E. Validitas Data

Guna menjamin dan mengembangkan validitas data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, teknik pengembangan validitas data yang akan digunakan adalah **teknik Triangulasi** (Pattom, 1980 : 100), yang terdiri dari triangulasi data atau sumber, teori dan metode. Selain itu peneliti juga akan menerapkan **kritik** terhadap berbagai sumber yang berupa **kritik intern** dan **kritik ekstern**. Kritik ekstern mengkritik masalah **otentisitas sumber**, sedangkan kritik intern mengkritik masalah **kredibilitas sumber** yang digunakan.

### F. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah **analisis interaktif** (Miles dan Huberman, 1984). Dalam model analisis ini, tiga komponen analisisnya yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Proses analisisnya secara keseluruhan bersifat *empirico inductive*, yang sangat berbeda dengan proses analisis dalam penelitian kuantitatif yang bersifat *hypotetico deductive* (Sutopo, 1996 : 140). Untuk lebih jelasnya proses analisis interaktif dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



**Model analisis interaktif**

## **V. DATA DIRI PENELITI**

### **KETUA**

- a. Nama : Miftahuddin, M.Hum.
- b. NIP : 132 305 856
- c. Jenis Kelamin : Pria
- d. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I/III b
- e. Jabatan : Asisten Ahli
- f. Jabatan Struktural : -
- g. Fakultas/Jurusan : FIS/Pendidikan Sejarah
- h. Perguruan Tinggi : UNY Yogyakarta
- i. Bidang Keahlian : 1. Sejarah Indonesia  
2. Sejarah Asia Barat
- j. Waktu Untuk Penelitian : 15 jam/minggu

### **ANGGOTA I**

- a. Nama : Ita Mutiara Dewi, S.I.P.
- b. NIP : 132 306 803
- c. Jenis Kelamin : Wanita
- d. Pangkat/Golongan : Penata Muda /III a
- e. Jabatan : Asisten Ahli
- f. Jabatan Struktural : -
- g. Fakultas/Jurusan : FIS/Pendidikan Sejarah
- h. Perguruan Tinggi : UNY Yogyakarta
- i. Bidang Keahlian : 1. Sejarah Politik dan Hubungan Internasional  
2. Sejarah dan Perspektif Global
- j. Waktu Untuk Penelitian : 15 jam/minggu

## VI. LANGKAH DAN JADUAL KEGIATAN

Jenis Kegiatan	Jadwal Kegiatan				
	Juli 1234	Agust 1234	Sept 1234	Okt 1234	Nop 1234
1. Persiapan Penelitian	xx				
2. Telaah Dokumen	xxxx				
3. Reduksi Data		xx			
4. Sajian Data/Analisis Awal			xx		
5. Verifikasi/Analisis Akhir			xx		
6. Penyusunan Draft Laporan Penelitian				xx	
7. Penyusunan Akhir & Seminar Hasil Penelitian				xx	
8. Penyempurnaan & Penggandaan Laporan				xx	xx

## VII. JUMLAH DAN RINCIAN BIAYA YANG DIUSULKAN

No	Kegiatan	Jumlah Dalam Rupiah
A.	1. Persiapan administrasi 2. Persiapan Penelitian a. Mengidentifikasi masalah b. Telaah Dokumen c. ATK selama persiapan Jumlah	112.500,- 75.000,- 75.000,- 150.000,- <b>412.500,-</b>
B.	Pelaksanaan Penelitian Tahap 1. a. Reduksi data b. Sajian data c. Evaluasi & refleksi Tahap 2. a. Analisis akhir b. ATK selama penelitian c. Foto copy selama pelaksanaan penelitian Jumlah	   112.500,- 112.500,- 150.000,-  150.000,- 75.000,- 105.000,- <b>705.000,-</b>
C.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian a. Menyusun draft laporan penelitian b. Menyusun laporan akhir c. Menyusun artikel untuk seminar penelitian d. ATK selama penyusunan laporan Jumlah	  150.000,- 232.500,- 150.000,- 225.000,- <b>757.500,-</b>
D.	Penggandaan & Pengiriman Laporan Hasil Penelitian 1. Penggandaan laporan penelitian 2. Pengiriman laporan penelitian akhir ke instansi terkait Jumlah	  300.000,- 150.000,- <b>450.000,-</b>
E.	Lain-lain (HR peneliti) Jumlah	 <b>675.000,-</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3.000.000,-</b>

*Terbilang : Tiga juta rupiah.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 1992. *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik*. Jakarta: Perum Percetakan Negara.
- Davidoff, LL. 1988. "Introduction To Psychology", alih bahasa Mari Juniati, *Psikologi Suatu Pengantar Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hatta, Mohamad. 1966. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Idayu Press
- Hatta, Mohamad. 1972. *Portrait of Patriot*. Alih bahasa Deliar Noer. The Hauge Paris: Mouton Publishers.
- Hatta, Mohamad. 1977. *Menuju Negara Hukum*. Jakarta: Idayu Pres.
- Hatta, Mohamad. 1977. *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Idayu Press.
- Joeniarto, 2001. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartodirdjo, Sartono.1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: PT Gramedia.
- Krippendorff, Klaus. 1991. Content Analysis: Introduction Its Theory and Methodology", Alih Bahasa Farid Wajidi, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Rajawali.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1996. *Demokrasi dan Nasionalisme Pengalaman Indonesia*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Miles, M.B. and Huberman, A.M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills CA: Sage Publications.
- Moleong, L.J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

- Muncaryadi. 2004. "Mendongkrak Budaya Lewat Pendidikan", dalam *Kedaulatan Rakyat* 28 Juli 2004.
- Patton, M.Q. 1980. *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills, CA.: Sage Publication.
- Sastraprteja, M. 1992. *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya*. Jakarta: Perum Percetakan Negara.
- Soedjatmoko. 1976. "Kesadaran Sejarah dalam Pembangunan". *Prisma* No. 7. Jakarta.
- Soekarno. 1966. *Indonesia dan Masyarakat baru Indonesia*. Jakarta: PP dan K.
- Spradley, J.P. 1980. *Participant Observation*. New York, N.Y.: holt, Rinehart, and Winston.
- Sutopo, H.B. 1995. *Kritik Seni Holistik Sebagai Model Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Sutopo, H.B. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Jurusan Seni Rupa Fakultas Sastra UNS.
- Swasono, Sri Edi. 1992. *Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipatif VS Konsentrasi Ekonomi*. Jakarta: Perum Percetakan Negara.
- Syamsuddin, Nazaruddin. 1993. *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Waluyo, H.J. 2000. "Hermeneutik Sebagai Pusat Pendekatan Kualitatif", dalam *Historika*, No.11. Surakarta: PPS UNJ KPK UNS.
- Wreksosuhardjo, Soenarjo. 2001. *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Reading Brick Pengantar Studi HAM*, 2001.

## Curriculum Vitae Ketua

1. Nama : Miftahuddin, M.Hum.
2. Jabatan : Dosen FIS UNY
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial/Pendidikan Sejarah
6. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
7. Bidang Keahlian : 1. Sejarah Indonesia
  
8. Pengalaman Penelitian :
  - a. Modernisasi di Perkotaan Jawa; Sejarah Kota Surakarta Tahun 1930-an.
9. Alamat Kantor : Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY  
Kampus Karang Malang Yogyakarta 55281  
Rumah : PPWH Gateng Condongcatur Depok  
Sleman Yogyakarta
10. Pendidikan : 1. S1 Sejarah Kebudayaan Islam IAIN  
Sunan Kalijaga  
2. S2 Program Studi Sejarah UGM

### Curriculum Vitae Anggota

1. Nama : Ita Mutiara Dewi, S.I.P.
2. Tempat/Tgl. Lahir : Magelang, 21 Maret 1981
3. NIP : 132 306 803
4. Pangkat / Golongan : Penata Muda /IIIa
5. Jabatan : Asisten Ahli
6. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial/Pendidikan Sejarah
7. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
8. Bidang Keahlian : - Sejarah Politik dan Hubungan Internasional  
- Sejarah dan Perspektif Global
9. Pendidikan : S1 Ilmu Hubungan Internasional UGM

10. Pengalaman Penelitian :

No	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Tahun
1	Tentara Anak-anak dalam Perspektif Hukum Internasional ( Studi Kasus: Tentara Anak LTTE Srilanka)	Skripsi	2003
2	Poins dan Coins: Studi Penulisan Bermakna dalam mk. Dasar-dasar dan Pengantar Ilmu Sejarah	Kelompok	2004

11. Penerbitan Karya Ilmiah:

No	Judul Artikel	Nama Jurnal / Majalah	Tahun
1	Pengalaman Militer Burma: Sebuah Analisis Historis-Politis	ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah	2005

12. Alamat Kantor : Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY  
Kampus Karang Malang Yogyakarta
- Alamat Rumah : Asrama Kartini-Kartini  
Karangmalang E-8C Yogyakarta

Yogyakarta, 18 Maret 2006  
Pembuat,

(Ita Mutiara Dewi, S.I.P.)



**USULAN PENELITIAN KELOMPOK**



**PANDANGAN HATTA TENTANG HAM DAN  
DEMOKRASI PANCASILA**

**Oleh:**

**Miftahuddin, M.Hum.**

**Aman, M.Pd.**

**Ita Mutiara Dewi**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2005**